

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-qur'an

### 2. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adjie Habib, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Boedi. Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Chandra S, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Grasindo
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Pres
- Ediwarman, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan : Pustaka Bangsa Press
- Ghazali, Kurniawan, 2013, *Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta: Kata Pena
- H.M., Arba, 2018, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika
- Helena Leny, dan Harris Freddy, *Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja, 2017, hal 57
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group

- HS, Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2017, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Isnur, Eko Yulian, 2008, *Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J.B., Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Sa'faat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta; Konstitusi Pers
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, 2004, *Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : ctk kedua, UMS Press
- Makarim, Edmon, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary* ed. ke-2, Jakarta : Rajawali Pers
- Meliala, S. Djaja, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- Nurita, Emma, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung : Refika Aditama
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT Grafindo Persada
- Samsaimun, 2018, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia

Sinaga, Henry, 2018, *Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik (Kompilasi Tulisan Tentang Carut-Marut Regulasi di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju

Susanto, Herry, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta: FH UII Press

Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Tehupeiory, Aartje, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widayanto Erdha, dan Pramukti Sigit Angge, 2015r, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yoyakarta: Pustaka Yustisia

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika

### 3. Jurnal

A.N Prasetya , Ana Silviana & Triyono, 2016, *Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tentang Kebenaran Fakta Peristiwa dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/Pn.Dpk)*. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3.Semarang

Addien Iftitah, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II No. 3, Ags-Okt 2014

Ade Kurniady Noor, Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Serviens In Iumine Veritatis*, 2016

- Adi Maja, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang” (Online), Jurnal Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Edwar, A.Rani, F., & Ali, D, Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol 8 No. 2, 2019
- Harnita., Muazzin., & Idami, Z, 2019, *Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.8 No. 3
- Julista Mustamu, 2011, Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Sasi*, Vol.17, No. 2, Bulan April – Juni
- Made Putri Saraswati, 2018, I Made Arya Utama, Ida Bagus Agung Putra Santika, *Kedudukan Hukum Akta PPAT Setelah Terbitnya Sertifikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah*, *Jurnal Ilmiah*
- Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Agustus 2020, Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1
- Rai Mantili dan Anita Afriana, Januari-Juni 2019, Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001), *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 5 No. 1
- Rina Candra Noor Santi, , Januari 2018, Identifikasi Biometrik Sidik Jari Dengan Metode Faktral (On line), *Jurnal Teknologi Informatika DINAMIK*, Vol. XIII No. 1
- Sri Purwanti, Juli-Desember 2016, Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Repertorium*, Vol. III No. 2
- Tengku Erwinsyahbana, Melinda, 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Lentera Hukum*, Vol. 5 No. 2

- Tian Terinaa, Rendy Renaldy, Mei 2020, Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.9 No.1
- Tri Yanty Sukanty Arkiang, September 2011, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 2
- Tunas, Charles Delon, 2019, Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang dan Tunai Dalam Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2
- Wibawa, Kadek Cahya Susila, 2019, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. *Jurnal Crepido*, Vol 01, No. 01
- Wirya Adhy Utama, Ghansham Anand, Juni 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1
- Yoga Satria Nugroho, 2018, Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Kantor Notaris di Surakarta), *Jurnal Ilmu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar, Nanda Anisa Lubis, Desember 2019, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 1

#### **4. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk

## 5. Artikel

Dewi Wulandari, Papua Nomer 1 News Portal, jobu.co.id, <https://jubi.co.id/kejati-papua-barat-resmi-tahan-oknum-notaris-tersangka-korupsi/amp/> diakses pada 19 Mei 2021 pukul 09.04

